



**DOKUMEN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/298/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Secara substansi, dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 memuat hasil evaluasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, serta rencana kerja dan pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kab/Kota di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19720704 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	6
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	6
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	6
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	7
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	7
3.3. Program dan Kegiatan	8
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	9
BAB V Penutup	10

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu penyusunan Ranwal Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2023 dalam Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024;

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1); analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah; review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Perekonomian.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Perekonomian sampai dengan tahun 2023, Kegiatan yang paling rendah pencapaian targetnya adalah kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yaitu 67,00% sedangkan kegiatan yang target pencapaian paling tinggi adalah kegiatan Pengelolaan Kebijakan, Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yaitu 85%

Presentase realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai 87,52%. Walaupun ada beberapa kegiatan yang persentase realisasinya tidak mencapai 100% akan tetapi pencapaian kinerja dari segi fisik sesuai target yaitu 100%.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Perekonomian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Perencanaan s/d Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026 (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Pekiraan capaian target program/kegiatan RENSTRA PD Tahun 2022	
					Target Renja Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	WAJIB									
1.20	PEMERINTAHAN UMUM									
4.01.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi									
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	6	1	1	100%	3	10	100%
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	6	1	1	100%	3	10	100%
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43	35	1	1	100%	6	42	98%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	550	350	1	1	100%	100	451	82%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan	50	40	1	1	100%	8	49	98%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026 (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan capaian target program/kegiatan RENSTRA PD Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =(10/4)
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan									
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	12	7	1	1	100%	2	10	83%
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terwujudnya peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan	12	5	1	1	100%	2	8	67%
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Meningkatnya Koordinasi di bidang BUMD dan Pelayanan di bidang BLUD	12	6	1	1	100%	2	9	75%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian secara tidak langsung turut mempengaruhi Nilai Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Daerah.

Kegiatan untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang merencanakan aksi pengendalian inflasi provinsi Kalimantan Tengah dan rencana pengAkhiran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi baik tingkat Wilayah Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah maupun skala Nasional. Disamping itu terdapat pula rapat-rapat teknis dan siaran pers yang dilaksanakan setiap bulan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah dan pengAkhiran pertumbuhan ekonomi sesuai arahan RPJMD. Selain itu juga melaksanakan Rapat Koordinasi PengAkhiran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan rencana aksi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang digunakan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel 2.2 sebagai berikut.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH s.d TAHUN 2023

NO.	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD								Realisasi Capaian						Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	37 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	37 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	37 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan			
2	Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	27 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	27 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	27 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan			
3	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	24 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	24 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	24 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan			
4	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	35 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	35 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	35 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan			
5	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	26 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	26 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	26 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan			
6	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	29 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	29 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	29 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan			
7	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan			
8	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	30 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya harmonisasi kebijakan (Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data mikro ekonomi belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data), Kurangnya SDM (banyak yang masuk masa purna bhakti, pendidikan pegawai belum sesuai kebutuhan/persyaratan).

Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan urusan pemerintahan umum antara lain Optimalisasi penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, perhubungan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pangan, serta mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan badan usaha milik daerah, dan penanaman modal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD merupakan langkah Akhir ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2024, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (sembilan belas) sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk RKPD Biro Perekonomian disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu :

1. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tupoksi Biro Perekonomian.
2. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk antisipasi dan penyelesaian target – target pembangunan nasional.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah
Biro Perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Raya	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Raya	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp 10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	P. Raya	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	P. Raya	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 10.000.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	P. Raya	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	P. Raya	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	Rp 10.000.000	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P. Raya	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 ASN	Rp 26.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P. Raya	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 ASN	Rp 26.500.000	
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	P. Raya	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	50 Jenis ATK	Rp 70.047.688	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	P. Raya	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	50 Jenis ATK	Rp 70.047.688	
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	P. Raya	Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Porsi	Rp 40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	P. Raya	Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Porsi	Rp 40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Raya	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Rp 235.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Raya	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Rp 235.000.000	
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	P. Raya	Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Rp 499.513.334	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	P. Raya	Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Rp 499.513.334	
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	P. Raya	Terpeliharanya sarana penunjang pelaksanaan tugas	4 Unit Kendaraan	Rp 63.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	P. Raya	Terpeliharanya sarana penunjang pelaksanaan tugas	4 Unit Kendaraan	Rp 63.500.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	P. Raya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	P. Raya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000	
II	Program Perekonomian dan Pembangunan					Program Perekonomian dan Pembangunan					
II.1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro	2 Dokumen Laporan	Rp 625.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro	2 Dokumen Laporan	Rp 625.000.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro	2 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Mikro	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro	2 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000	
II.2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen Laporan	Rp 1.010.369.800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen Laporan	Rp 1.010.369.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	
II.3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen Laporan	Rp 175.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen Laporan	Rp 175.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	3 Dokumen Laporan	Rp 180.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	3 Dokumen Laporan	Rp 180.000.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	3 Dokumen Laporan	Rp 195.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kab/Kota	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	3 Dokumen Laporan	Rp 195.000.000	
JUMLAH					Rp 3.679.930.822	JUMLAH					Rp 3.679.930.822

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan Kebijakan Nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional yang telah didukung dan dilaksanakan daerah, sehingga penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional.

Kebijakan nasional yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran Rencana kerja Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia.
2. Penguatan konektivitas.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan dari berbagai sumber, dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi daerah, isu – isu strategis, serta memperhatikan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 maka ditentukanlah tujuan dan sasaran Renja Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya koordinasi antar Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota dalam perencanaan peningkatan pemberdayaan perekonomian daerah di Kalimantan Tengah.
- b. Meningkatnya koordinasi teknis antar instansi terkait di bidangnya dalam implementasi kebijakan secara sinergis dan menyeluruh.

2. Sasaran

- a. Terciptanya koordinasi dan fasilitasi kegiatan sektor Pemberdayaan Perekonomian yang terarah sinkron dan terpadu dalam pembangunan perekonomian daerah.
- b. Terciptanya kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sumber daya alam, masyarakat serta hak dan kewajiban yang seimbang.

- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dibidang kebijakan perekonomian daerah serta pelayanan kepada masyarakat/mitra/instansi terkait.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai langkah lanjut dalam pelaksanaan Renstra tahun 2021 – 2026 maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan selama 5 tahun, terdapat beberapa perubahan judul kegiatan disesuaikan kondisi yang sedang berkembang sehingga merubah kode rekening. Akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah capaian program maupun indikator kinerja kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagai dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dibuat dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD sebagai berikut.

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 beserta rencana pendanaannya terdapat tabel 4.1 yang menampilkan program, kegiatan dan rencana anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Pada tahun ini terdapat 2 program, 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Penjelasan secara rinci terdapat dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2024						Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan			Program			Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi												Rp 1.220.047.688
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Rp 20.000.000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terkordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P.Raya	0	8 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	8 Dokumen	Rp 10.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	P.Raya	0	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	2 Dokumen	Rp 10.000.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp 10.000.000
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terkordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	P.Raya	0	10 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	10 Dokumen	Rp 10.000.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Rp 30.000.000
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Weningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P.Raya	0	12 ASN	Rp 26.500.000	APBD		0	12 ASN	Rp 30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2024						Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan			Program			Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												Rp 470.047.688
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	P.Raya	0	50 Jenis ATK	Rp 70.047.688	APBD		0	50 Jenis ATK	Rp 80.047.688	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	P.Raya	0	500 Porsi	Rp 40.000.000	APBD		0	500 Porsi Makanan	Rp 40.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P.Raya	0	1 Tahun	Rp 235.000.000	APBD		0	1 Tahun	Rp 350.000.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Rp 590.000.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	P.Raya	0	1 Tahun	Rp 499.513.334	APBD		0	1 Tahun	Rp 590.000.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Rp 100.000.000
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya sarana penunjang pelaksanaan tugas Daerah Provinsi	P.Raya	0	4 Unit Kendaraan	Rp 63.500.000	APBD		0	4 Unit Kendaraan	Rp 70.000.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya sarana dan prasarana pendukung	P.Raya	0	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000	APBD		0	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000	
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan												Rp 3.710.369.800
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian												Rp 1.150.000.000
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro	Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 625.000.000	APBD		0	2 Dokumen Laporan	Rp 850.000.000	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro	Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000	APBD		0	2 Dokumen Laporan	Rp 300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2024						Catatan Penting	Rencana Tahun 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Program	Kegiatan	Program		Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							3			4			5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

BAB IV

RENCANA KERJA

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari APBD murni tahun 2024 yang diambil dari tarikan sistem kaltengprov.sipd.kemendagri.go.id saat tutup tahapan RKPD Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.679.930.822,-** dengan rincian sebagaimana tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2024							Catatan Penting	Rencana Tahun 2025						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan												
									3	4			5	6	7	8	9	10
1	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi												Rp 1.220.047.688				
4.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp 20.000.000			Rp 20.000.000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terkoordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P.Raya	0	8 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	8 Dokumen	Rp 10.000.000						
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	P.Raya	0	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	2 Dokumen	Rp 10.000.000						
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp 10.000.000			Rp 10.000.000		
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terkoordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	P.Raya	0	10 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		0	10 Dokumen	Rp 10.000.000						
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Rp 26.500.000			Rp 30.000.000		
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkoordinasinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P.Raya	0	12 ASN	Rp 26.500.000	APBD		0	12 ASN	Rp 30.000.000						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2024							Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
		Program	Kegiatan			Program	Kegiatan								
			3	4						5	6			7	8
1	2														
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor		P.Raya	0	50 Jenis ATK	Rp 345.047.688	APBD	0	50 Jenis ATK	Rp 470.047.688		
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu		P.Raya	0	500 Porsi	Rp 40.000.000	APBD	0	500 Porsi Makanan	Rp 40.000.000		
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD		P.Raya	0	1 Tahun	Rp 235.000.000	APBD	0	1 Tahun	Rp 350.000.000		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah														
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Tersedianya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		P.Raya	0	1 Tahun	Rp 499.513.334	APBD	0	1 Tahun	Rp 590.000.000		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah														
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Terselenggaranya sarana penunjang pelaksanaan tugas Daerah Provinsi		P.Raya	0	4 Unit Kendaraan	Rp 63.500.000	APBD	0	4 Unit Kendaraan	Rp 70.000.000		
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkoordinasinya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Terselenggaranya sarana dan prasarana pendukung		P.Raya	0	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000	APBD	0	42 Unit Komputer dan Laptop	Rp 30.000.000		
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan														
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian														
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro		Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 625.000.000	APBD	0	2 Dokumen Laporan	Rp 850.000.000		
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Terselenggaranya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro		Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000	APBD	0	2 Dokumen Laporan	Rp 300.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Pagu Anggaran Tahun 2024							Catatan Penting	Rencana Tahun 2025						
		Program		Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
		3	4			Program	Kegiatan				Program			Kegiatan					
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam																		
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Provinsi Kalimantan Tengah	0	3 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	APBD		0	3 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000						
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 1.010.369.800	APBD		0	2 Dokumen Laporan	Rp 1.060.369.800						
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Provinsi Kalimantan Tengah	0	2 Dokumen Laporan	Rp 150.000.000	APBD		0	2 Dokumen Laporan	Rp 200.000.000						
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD																		
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Provinsi Kalimantan Tengah	0	5 Dokumen Laporan	Rp 175.000.000	APBD		0	5 Dokumen Laporan	Rp 400.000.000						
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Provinsi Kalimantan Tengah	0	3 Dokumen Laporan	Rp 180.000.000	APBD		0	3 Dokumen Laporan	Rp 300.000.000						
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Provinsi Kalimantan Tengah	0	3 Dokumen Laporan	Rp 195.000.000	APBD		0	3 Dokumen Laporan	Rp 400.000.000						
JUMLAH											JUMLAH		Rp 4.930.417.488						

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2024. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggaran pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2024 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2024.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19720704 199303 1 004